

**TAHUN
2024**



LAPORAN KEUANGAN BPBD DIY AUDITED



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Kenari No.14 A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. 0274-555836 Fax. 0274-555842

<http://www.bpbddiyo.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, kami atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Secara singkat Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi yang mencakup unsur unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| A. Pendapatan ditetapkan sebesar | Rp0,00 |
| Realisasinya mencapai sebesar | Rp0,00 |
| Sehingga kurang dari target sebesar | Rp0,00 |
| Atau sebesar 0% | |
| B. Belanja ditetapkan sebesar | Rp17.995.141.028,00 |
| Realisasinya mencapai sebesar | Rp17.047.525.142,00 |
| Sehingga kurang dari target sebesar | Rp947.615.886,00 |
| Atau sebesar 94,74% | |
| C. Suplus/Defisit Anggaran ditetapkan defisit sebesar Rp(17.995.141.028,00) | |
| dengan realisasi defisit sebesar Rp(17.047.525.142,00) atau sebesar 94,73% | |

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2024.

Jumlah Aset 31 Desember 2024 sebesar	Rp22.341.612.761,03
Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp2.178.191.335,43
Investasi Jangka Panjang sebesar	Rp0,00
Persediaan	Rp2.178.191.335,43
Aset tetap sebesar	Rp19.739.911.249,40
Dana Cadangan sebesar	Rp0,00
Dan Aset lainnya sebesar	Rp423.510.176,20,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar	Rp39.266.057,00
Yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar	Rp39.266.057,00
serta dari Kewajiban jangka panjang sebesar	Rp0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar	Rp22.341.612.761,03

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber data ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan LO terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah LO	Rp0,00
Pendapatan Transfer LO	Rp0,00
Lain lain Pendapatan yang sah LO	Rp5.162.810.000,00
Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp0,00

Beban terdiri dari :

Beban Operasi	Rp18.983.635.533,92
Beban Penyusutan	Rp3.409.874.831,53

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Rp35.889.203,80

Surplus/Defisit Operasional

Rp(17.266.589.569,25)

Surplus/Defisit Laporan Operasional

Rp(17.266.589.569,25)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal

Rp23.511.492.399,31

Surplus Laporan Operasional

Rp(17.266.589.569,25)

RK PPKD

Rp17.047.525.142,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

Rp(990.081,268,03)

Ekuitas Akhir

Rp22.302.346.703,03

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan LO, beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharap tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*steakeholder*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Kepala Pelaksana



DES. NOVIAR RAHMAD, M.Si.

NIP. 197011161990031001

DAFTAR ISI

	Halaman
1. JUDUL	i
2. KATA PENGANTAR	ii
3. DAFTAR ISI	v
4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vii
6. LAPORAN OPERASIOANAL (LO)	viii
7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	ix
8. NERACA	x
9. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	1
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	12
BAB III PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN	17
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	
A. Lampiran Neraca	
1. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	
2. Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi	
3. Penjabaran LRA	
B. Lampiran Neraca	
1. Berita Acara Penutupan Kas	

2. Register Penutupan Kas
3. Berita acara Pemeriksaan Kas
4. Register Pemeriksaan Kas
5. Rekapitulasi Belanja Barang Pakai Habis
6. Berita Acara Stock Opname Persediaan
7. Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap)
8. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya
9. Kertas Kerja Mutasi Persediaan
10. Rekap Penyusutan Aset Tetap dan Rekap Penyusutan Aset Lainnya
11. Rekap Buku Inventaris klasifikasi Intracoubtable per 31 Desember 2024
12. Tabel Lampiran Hibah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤ꧀ꦢꦤꦼꦫꦁ

Alamat Jl. Kenari 14a Kode Pos 55166 Telepon (0274) 555836, 555585 Faksimile (0274) 555326

Laman bpbdd.jogjaprov.go.id, Email bpbdd@jogjaprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Yogyakarta, 31 Desember 2024
Kepala Pelaksana



Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si.

NIP. 197011161990031001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 92);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 27);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Bab III	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
	3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
	3.1.1 Pendapatan-LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Aset
	3.1.4 Kewajiban
	3.1.5 Ekuitas
	3.1.6 Pendapatan-LO
	3.1.7 Beban
	3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas
Bab IV	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD
Bab V	Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY				
PENDAPATAN		5.162.810.000	5.162.810.000	0,00 %
Pendapatan Asli Daerah				
Hasil Retribusi Daerah				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO		5.162.810.000	5.162.810.000	0,00 %
BELANJA	17.995.141.028,00	17.047.525.142,00	947.615.886,00	94,73 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.943.500,00	6.943.500,00	0,00	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.825.050,00	1.825.050,00	0,00	100,00 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.346.932.278,00	10.542.421.827,00	804.510.451,00	92,91 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.520.000,00	34.520.000,00	0,00	100,00 %

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	29.260.000,00	29.260.000,00	0,00	100,00 %
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.781.750,00	19.781.750,00	0,00	100,00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.152.000,00	103.107.214,00	44.786,00	99,96 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	515.199.800,00	502.176.986,00	13.022.814,00	97,48 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	986.176.000,00	980.244.010,00	5.931.990,00	99,40 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.150.000,00	14.944.300,00	155.700,00	98,98 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	111.932.750,00	91.098.300,00	20.834.450,00	81,39 %

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.844.800,00	72.819.324,00	4.025.476,00	94,77 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.987.000,00	14.987.000,00	0,00	100,00 %
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.008.999.550,00	997.147.024,00	11.852.526,00	98,83 %
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	151.250.000,00	144.585.024,00	6.664.976,00	95,60 %
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	7.997.900,00	7.973.400,00	24.500,00	99,70 %
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	368.500.000,00	361.207.610,00	7.292.390,00	98,03 %
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	153.999.950,00	152.190.090,00	1.809.860,00	99,00 %

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	514.300.000,00	498.380.720,00	16.519.280,00	96,91 %
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	83.003.700,00	83.003.700,00	0,00	100,00 %
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.350.065.000,00	1.318.183.212,00	31.881.788,00	97,64
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	121.641.000,00	117.580.703,00	4.060.297,00	96,67 %
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00 %
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00 %
Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	475.735.000,00	473.020.748,00	2.714.252,00	99,43 %
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	465.994.000,00	449.173.750,00	16.820.250,00	96,39 %

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sesuai tugas dan

fungsinya melaksanakan 4 program, 12 kegiatan, dan 28 sub kegiatan. Total belanja menurut program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp17.995.141.028,00 terealisasi sebesar Rp17.047.525.142,00 atau 94,73%. Secara umum pelaksanaan belanja daerah dan kinerja dapat dicapai dengan baik. Namun ada kendala yg dihadapi terhadap penyerapan anggaran sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp947.615.886,00 atau 5,27%. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp11.346.932.278,00 terealisasi sebesar Rp10.542.421.827,00 atau 92,91% karena pembayaran gaji dan tunjangan disesuaikan dengan komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Selain itu tunjangan fungsional bagi PPPK Nasional sepenuhnya masih belum bisa dicairkan karena menunggu info lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah DIY.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp111.932.750,00 terealisasi sebesar Rp91.098.300,00 atau 81,39% karena menyesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp76.844.800,00 terealisasi sebesar Rp72.819.324,00 atau 94,77% karena menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DIY

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2024	2023
1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pendapatan-LRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 100,00 %

3.1.2 <u>Belanja</u>	<u>Rp17.047.525.142,00</u>	<u>Rp21.446.824.199,00</u>
----------------------	----------------------------	----------------------------

Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp17.995.141.028,00 dengan realisasi sebesar Rp17.047.525.142,00 atau 94,73% Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp17.023.262.218,00</u>	<u>Rp21.278.701.199,00</u>
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp17.970.441.028,00 dan realisasi sebesar Rp17.023.262.218,00 atau 94,73%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 <u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp10.590.961.827,00</u>	<u>Rp9.699.479.478,00</u>
----------------------------------	----------------------------	---------------------------

Belanja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp11.395.472.278,00 dan realisasi sebesar Rp10.590.961.827,00 atau 92,94%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.569.844.379,00	5.865.158.327,00	89,27
a.	Belanja Gaji Pokok ASN	5.155.168.846,00	4.766.182.95,00	92,45
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	283.777.478,00	260.485.486,00	91,79
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	216.860.000,00	148.820.000,00	68,62

d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	256.270.000,00	118.800.000,00	46,36
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.545.000,00	54.645.000,00	90,26
f.	Belanja Tunjangan Beras ASN	156.847.236,00	145.491.780,00	92,76
g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.186.426,00	22.154.674,00	95,55
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.494,00	32.359,00	93,81
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	374.735.223,00	316.680.040,00	84,51
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.604.919,00	9.894.387,00	93,30
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	31.814.757,00	21.971.651,00	69,06
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.777.087.899,00	4.777.087.899,00	97,91
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.370.276.302,00	2.322.673.800,00	97,99
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.406.811.597,00	2.354.589.700,00	97,83
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.540.000,00	48.540.000,00	100,00
a.	Belanja Honorarium	33.540.000,00	33.540.000,00	100,00
b.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Pegawai-LRA	11.395.472.278,00	10.590.961.827,00	92,94

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Rp6.177.042.391,00 Rp10.441.790.721,00
Jasa

Belanja Barang dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.316.523.750,00 dan realisasi sebesar Rp6.177.042.391,00 atau 97,79%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	1.793.075.400,00	1.762.151.333,00	98,28
2.	Belanja Jasa kantor	3.565.251.550,00	3.478.039.046,00	97,55
3.	Belanja Sewa Tanah	20.704.800,00	17.040.400,00	82,30
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.520.000,00	70.520.000,00	100,00
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	96.600.000,00	85.690.000,00	88,71
6.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.160.000,00	143.352.000,00	99,44
7.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.490.000,00	4.326.000,00	96,35
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	621.722.000,00	615.923.612,00	99,07
9.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	240.000.000,00	239.493.000,00	99,79
10.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	18.445.000,00	15.765.000,00	85,47
	Jumlah	6.316.523.750,00	6.177.042.391,00	97,79

Belanja Barang Pakai Habis yang tidak dicatat sebagai persediaan hanya Belanja Makan Minum Rapat. Selain itu semua menambah nilai persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Dari Belanja Hibah diatas rincian penerima hibah sebagai berikut:

1	FPRB Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul	Hibah Alat Penanggulangan Bencana Tingkat Desa
2	KATANA Bumijo, Kemantren Jetis	Hibah Alat Penanggulangan Bencana Tingkat Desa
3	Kaltana Kricak, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, KT Yogyakarta	Hibah Alat Penanggulangan Bencana Tingkat Desa
4	KTB Kricak Kidul	Hibah Alat Penanggulangan Bencana Tingkat Desa
5	Tagana Kota Yogyakarta	Hibah Alat Penanggulangan Bencana Tingkat Desa
6	KTB Prenggan, Kotagede	Hibah Alat Penanggulangan Bencana Tingkat Desa

Rincian penerima bantuan sosial sebagai berikut:

1	Tumijo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
2	Riyadi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
3	Ngadirin	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
4	Sri Sutarmi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
5	Sugi/ Suprpto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
6	Ny. Saulani	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
7	Parwoto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
8	Yhani Sugandhi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
9	Mlnto Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
10	Untung	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
11	Wahono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
12	Minder Lestari	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
13	Miskam	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap

14	Narto Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
15	Lagiyo/ Warno Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
16	Jamiarto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
17	Supandi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
18	Jiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
19	Jeminem	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
20	Sabar	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
21	Levi Catur Pertiwi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
22	Muji Kariyo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
23	Tukijo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
24	Ngatini	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
25	Tejo Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
26	Suyadi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
27	Basuki	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
28	Trisno Widodo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
29	Hadi Utomo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
30	Sokiran	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
31	Warsihono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
32	Eko Prihono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
33	Ngadiran	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
34	Jarwo Sriyanto	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
35	Muji Wiyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
36	Suharjo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
37	Wadi Suwatno/Wolo Sukarno	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
38	Saridi	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap

39	Sumarno/Jemirah	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
40	Harji Susanto/Ngatijo	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
41	Warto Pawiro	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
42	Giyono	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
43	Hadi Sutrisno	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap
44	Selari	Kopeng	Biaya Pendaftaran Hak Tanah Huntap

3.1.2.2 Belanja Modal

Rp24.262.924,00

Rp168.123.000,00

Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.262.924,00 atau 98,23%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.2 Belanja Modal

Rp24.262.924,00

Rp168.123.000,00

Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.262.924,00 atau 98,23%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.500.000,00	2.475.000,00	99,00
2.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33
3.	Belanja Modal Sumur	19.800.000,00	19.787.924,00	99,94
	Jumlah	<u>24.700.000,00</u>	<u>24.262.924,00</u>	<u>98,23</u>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.262.924,00

3.1.3 Aset

Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.341.612.761,03 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.178.191.335,43 Aset

Tetap sebesar Rp19.739.911.249,40 dan Aset Lainnya sebesar Rp423.510.176,20 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
3.1.3.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp2.178.191.335,43</u>	<u>Rp3.332.529.816,35</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.178.191.335,43 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00

3.1.3.1.5 <u>Persediaan</u>	<u>Rp2.178.191.335,43</u>	<u>Rp3.332.529.816,35</u>
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.178.191.335,43 dengan rincian sebagai berikut

No	<u>Uraian</u>	2024
	Saldo Awal	3.332.529.816,35
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.000.000,00
2.	Bahan Kimia	3.272.700,00
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	89.700.000,00
4.	Bahan Lainnya	157.722.060,43
5.	Alat Tulis Kantor	9.964.510,00
6.	Kertas dan Cover	5.135.302,00
7.	Bahan Cetak	9.352.600,00
8.	Benda Pos	520.000,00
10.	Bahan Komputer	0,00
11.	Perabot Kantor	29.144.310,00
12.	Alat Listrik	10.977.800,00
13.	Perlengkapan Dinas	6.445.000,00
14.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.480.000,00
15.	Suvenir/Cendera Mata	1.650.000,00
16.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	105.601.037,60
17.	Obat	146.000,00
18.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	32.539.511,00
19.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00
20.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	1.697.540.504,40
	Jumlah	2.178.191.335,43

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah persediaan berasal dari Hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Persediaan untuk Tujuan Strategis Berjaga-Jaga Lainnya sebesar Rp2.004.813.000,00 berupa tenda, selimut, velbed, perahu katamaran, genset, dan matras. Selain itu terdapat mutasi tambah persediaan sebesar Rp1.366.190.400,00 yang berasal dari Belanja Barang Pakai Habis

b. Mutasi kurang

Mutasi Kurang Persediaan berupa mutasi keluar yaitu:

No	OPD	Jumlah
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Rp15.760.000,00
2.	Asekda 1 Pemberdayaan Masyarakat DIY	Rp1.537.000,00
3.	Inspektorat DIY	Rp6.720.000,00
4.	Biro Hukum DIY	Rp4.934.000,00
5.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Rp12.065.000,00
6.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	Rp23.340.000,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Rp30.270.000,00
8.	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Rp34.600.000,00
9.	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Rp1.046.250.000,00
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Rp10.808.000,00
11.	Biro Tata Pemerintahan DIY	Rp12.400.000,00

Selain itu pengurangan persediaan juga berasal dari pemakaian persediaan atau beban persediaan sebesar Rp3.300.248.313,92

3.1.3.2 Aset Tetap Rp19.739.911.249,40 Rp19.827.953.304,96

Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.739.911.249,40 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1. Tanah Rp2.975.357.000,00 Rp0,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.975.357.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Tanah sebesar Rp0,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Tanah sebesar Rp0,00.

c. Hibah/Bantuan

Hibah masuk sebesar Rp2.975.357.000,00 berasal dari Hibah BNPB berupa Tanah Huntap.

d. Ekstrakomtabel

Tanah Tahun 2024 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Tanah per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp2.975.357.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024
1.	Tanah Pertanian	2.975.357.000,00

3.1.3.2.1. Peralatan dan Mesin Rp42.227.397.209,67 Rp46.304.247.577,67

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.227.397.209,67 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp846.784.818,00 berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp24.262.924,00; Mutasi dari Paniradya DIY sebesar Rp92.671.894,00; Reklasifikasi yang berasal dari ekstrakomtabel sebesar Rp547.210.000,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.091.758.186,00 berasal dari reklas ke Aset Lainnya sebesar 2.001.034.768 dan Mutasi keluar sebesar 3.080.723.418,00 yaitu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebesar Rp2.829.183.418,00 dan ke Satuan Polisi Pamong Praja DIY sebesar Rp251.540.000.

c. Hibah/Bantuan

Hibah/Bantuan sebesar Rp182.640.000 berasal dari Kementerian Dalam Negeri berupa Mebel.

d. Ekstrakomtabel

Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp Rp42.227.397.209,67 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024
1.	Alat Besar	650.182.500,00
2.	Alat Angkutan	19.800.264.324,00
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	276.322.000,00
4.	Alat Pertanian	108.000.000,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.227.269.820,00
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.709.948.770,00
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	574.967.954,94
8.	Alat Laboratorium	525.221.913,73
9.	Alat Persenjataan	591.859.600,00
10.	Komputer	2.003.695.788,00
11.	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	19.787.924,00
12.	Alat Keselamatan Kerja	1.272.335.900,00
13.	Rambu-rambu	80.175.000,00
14.	Peralatan Olahraga	387.365.715,00
	Jumlah	Rp42.227.397.209,67

3.1.3.2.3 Gedung dan Rp9.154.961.350,00 Rp9.308.799.350,00
 Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.154.961.350,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.950.315.550,00 berasal dari gabung aset pada Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.565.104.400,00. Gabung aset merupakan penggabungan atau konsolidasi beberapa aset menjadi satu unit aset yang lebih besar atau lebih terpadu. Selain itu, terdapat penambahan yang berasal dari koreksi kode barang aset tetap sebesar Rp385.211.150,00 berupa Bangunan Parkir sebesar Rp39.185.500,00 dan Pagar sebesar Rp346.025.650,00 reklas dari Bangunan Gedung Kantor. Koreksi kode barang aset tetap merupakan proses perubahan atau penyesuaian data terkait kode klasifikasi aset tetap.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.104.153.550,00 berasal dari gabung aset sebesar Rp.1.565.104.400,00 berasal dari Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp57.333.000,00 dan Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp1.507.771.400,00. Gabung aset merupakan penggabungan atau konsolidasi beberapa aset menjadi satu unit aset yang lebih besar atau lebih terpadu. Selain itu, terdapat pengurangan yang berasal dari koreksi kode barang aset tetap sebesar Rp539.049.150,00 pada Bangunan Gedung Kantor. Koreksi kode barang aset tetap merupakan proses perubahan atau penyesuaian data terkait kode klasifikasi aset tetap.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah Gudang dan Bangunan sebesar Rp0,00.

d. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp9.154.961.350,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024
1	Bangunan Gedung Kantor	8.495.986.200,00
2	Bangunan Gedung Instalasi	54.910.000,00
3	Bangunan Tempat Ibadah	0,00
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool	218.854.000,00
	Jumlah	Rp9.308.799.350,00

3.1.3.2.4	<u>Tugu Titik</u>	<u>Rp346.025.650,00</u>	<u>Rp0,00</u>
	Kontrol/Pasti		

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp346.025.650,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp346.025.650,00 berasal dari koreksi kode barang aset tetap. Penambahan tersebut berasal dari reklas Bangunan Gedung Kantor menjadi Tugu Titik Kontrol/Pasti. Koreksi kode barang

aset tetap merupakan proses perubahan atau penyesuaian data terkait kode klasifikasi aset tetap.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp346.025.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024
1.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	346.025.650,00
	Jumlah	Rp346.025.650,00

3.1.3.2.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp6.792.186.700,00 Rp6.638.348.700,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.792.186.700,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp153.838.000,00 berasal dari koreksi kode barang aset tetap. Penambahan tersebut berasal dari reklas Bangunan Gedung Kantor menjadi Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp29.912.000,00 dan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp123.926.000,00. Koreksi kode barang aset tetap merupakan proses perubahan atau penyesuaian data terkait kode klasifikasi aset tetap.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp6.792.186.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024
1.	Jalan dan Jembatan	1.485.268.000,00
2.	Bangunan Air	573.235.900,00
3.	Instalasi	4.406.182.000,00
4.	Jaringan	327.500.800,00
	Jumlah	<u>Rp6.792.186.700,00</u>

3.1.3.2.6 Aset Tetap Lainnya Rp419.145.000,00 Rp419.145.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp419.145.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 berasal dari Aset Tetap Renovasi.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp419.145.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024
1.	Bahan Perpustakaan	Rp54.528.000,00
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	Rp24.940.000,00
3	Aset Tetap Renovasi	Rp339.677.000,00
	Jumlah	Rp419.145.000,00

3.1.3.2.8

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(41.829.136.010,27) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(37.609.417.555,03)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.145.896.798,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2.073.821.657,24))
	Jumlah	Rp(41.829.136.010,27)

3.1.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp394.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

3.1.3.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp394.500.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp0,00.
- b. Mutasi kurang
Mutasi kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp0,00.
- c. Penerimaan hibah
Penerimaan hibah sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp394.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Software	20.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	374.500.000,00

	Jumlah	<u>Rp394.500.000,00</u>
--	--------	-------------------------

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp394.500.000,00

3.1.3.3.4 Aset Lain-lain Rp1.590.987.081,00 Rp10.000.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.590.987.081,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Lain-lain Rp2.011.034.768,00 berasal dari reklas aset menjadi Aset Rusak Berat/Usang berasal dari Peralatan dan Mesin.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Aset Lain-Lain sebesar Rp430.047.687,00 berasal dari penghapusan Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91/SEKDA/IX/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

No	Uraian	Jumlah
1.	Aset Rusak Berat/Usang	1.590.987.081,00

3.1.3.3.4 Akumulasi Penyusutan Rp(1.561.976.904,80) Rp(10.000.000,00)
 Aset Lainnya

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.561.976.904,80 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp(1.561.976.904,80,00) berasal dari reklas aset menjadi Aset Rusak Berat/Usang berasal dari Peralatan dan Mesin.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp(394.158.483,20) berasal dari penghapusan Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91/SEKDA/IX/2024

tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Perlatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

No	Uraian	Jumlah
1.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.561.976.904,80)

3.1.4 Kewajiban Rp39.266.057,00 Rp43.490.722,00

Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.490.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp39.266.057,00 Rp43.490.722,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.490.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Utang Belanja Rp39.266.057,00 Rp43.490.722,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2024 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belanja Jasa	39.266.057,00
a.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	510.285,00
b.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	67.500,00
c.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	38.688.272,00
	Jumlah	Rp39.266.057,00

1.5	<u>Ekuitas</u>	<u>Rp22.302.346.701,03</u>	<u>Rp23.511.492.399,31</u>
-----	----------------	----------------------------	----------------------------

Saldo Ekuitas sebesar Rp22.302.346.701,03 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2024. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	22.003.673.416,53
	Surplus Defisit – LO	(17.230.700.365,45)
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	17.047.525.142,00
	Jumlah	Rp21.820.498.193,08

2024

2023

3.1.6	Pendapatan-LO	Rp5.162.810.000,00	Rp937.428.984,00
-------	---------------	--------------------	------------------

Pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp5.162.810.000,00 meliputi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp5.162.810.000,00

3.1.6.1	Pendapatan Hibah-LO	Rp5.162.810.000,00	Rp937.428.984,00
---------	---------------------	--------------------	------------------

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp5.162.810.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	182.640.000,00
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	4.980.170.000,00
	Jumlah	Rp5.162.810.000,00

Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO pada Tahun 2024 sejumlah Rp5.162.810.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari Hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Persediaan untuk Tujuan Strategis Berjaga-Jaga Lainnya yaitu tenda, selimut, velbed, perahu katamaran, genset, dan matras sebesar Rp2.004.813.000,00; Hibah Aset Tetap berupa Mebel dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp182.640.000,00; dan Hibah Tanah Hutan sebesar Rp2.975.357.000,00 berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

	2024	2023
3.1.7 <u>Beban</u>	<u>Rp22.393.510.365,45</u>	<u>Rp26.235.563.521,03</u>

Realisasi Beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.393.510.365,45 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1 <u>Beban Operasi</u>	<u>Rp18.983.635.533,92</u>	<u>Rp22.689.350.042,49</u>
------------------------------	----------------------------	----------------------------

Realisasi Beban Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 18.983.635.533,92 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 10.590.961.827,00; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 8.137.415.706,92 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1 <u>Beban Pegawai</u>	<u>Rp10.590.961.827,00</u>	<u>Rp9.699.479.478,00</u>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

Realisasi Beban Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.590.961.827,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	5.865.158.327,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	4.766.182.950,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	260.485.486,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	148.820.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	118.800.000,00

e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.645.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	145.491.780,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.154.674,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	32.359,00
i.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	316.680.040,00
j.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.894.387,00
k.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	21.971.651,00
	Jumlah	Rp5.865.158.327,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Rp4.677.263.500,00
a.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp2.322.673.800,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp2.354.589.700,00
	Jumlah	Rp 4.677.263.500,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp48.540.000,00
	Beban Honorarium	Rp33.540.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD	Rp15.000.000,00
	Jumlah	Rp48.540.000,00
	Jumlah Beban Pegawai	Rp10.590.961.827,00

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp8.137.415.706,92 Rp11.877.723.564,49
Realisasi Beban Barang dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.137.415.706,92 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
----	--------	-----------

1.	Beban Barang	3.726.749.313,92
2.	Beban Jasa	3.647.064.781,00
3.	Beban Pemeliharaan	147.678.000,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	615.923.612,00
6.	Beban Hibah	239.493.000,00
7.	Beban Bantuan Sosial	15.765.000,00
	Jumlah	Rp8.137.415.706,92

Deviasi antara Laporan Operasional Beban Barang dan Jasa dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Beban Barang dan Jasa	Selisih
Rp6.177.042.391,00	Rp8.137.415.706,92	Rp(1.960.373.315,92)

Deviasi tersebut berasal dari:

- a. Selisih antara Belanja Barang Pakai Habis dengan Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp1.964.597.980,92 yang berasal dari penggunaan/beban persediaan
- b. Selisih antara Belanja Jasa Kantor dengan beban Jasa Kantor sebesar Rp4.224.665 yang berasal dari Beban Tagihan Listrik, Air, Telepon dengan Belanja Tagihan Listrik, Air, Telepon

3.1.7.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.409.874.831,53 Rp3.546.213.478,54

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.409.874.831,53 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.925.978.351,21
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	185.422.839,50
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	298.473.640,82
	Jumlah	Rp3.409.874.831,53

3.1.7.1.4 Defisit Non Operasional-LO Rp35.889.203,80 Rp0,00

Realisasi Defisit Non Operasional-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.889.203,80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	35.889.203,80
	Jumlah	Rp35.889.203,80

Defisit Non Operasional-LO berasal dari saldo dari jurnal penghapusan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

3.1.7.2 Surplus/Defisit-LO Rp(17.226.589.569,25) Rp(25.298.134.537,03)

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(17.226.589.569,25) berasal dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp5.162.810.000,00 dikurangi Beban sebesar Rp22.393.510.365,45 dan dikurangi Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp35.889.203,80.

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp22.302.346.704,03 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2024. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal Rp23.511.492.399,31 ditambah Surplus/Defisit-LO Rp(17.226.589.569,25), RK PPKD Rp17.047.525.142,00 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp(990.081.268,03) seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	23.511.492.399,31
	Surplus Defisit – LO	(17.226.589.569,25)
	RK PPKD	17.047.525.142,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(990.081.268,03)

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	Rp22.302.346.704,03

BAB IV PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIM Aset.

Perencanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

KEPALA PELAKSANA



Drs. NOVIAR RAHMAD, M. Si

NIP.197011161990031001